

PENGAWASAN PERAN INTELIJEN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH PADA ANCAMAN TERORISME DALAM Mendukung PERTAHANAN NEGARA DI JAKARTA

SUPERVISION OF THE ROLE OF THE REGIONAL INTELLIGENCE COMMUNITY ON TERRORISM THREAT IN SUPPORTING STATE DEFENSE IN JAKARTA

Sarah Syifa Malahayati¹, S. Pantja Djati², Pujo Widodo³

Program Studi Manajemen Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan,
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
sarahsyifa87@yahoo.com, spantjadjati@yahoo.co.id,
pujowidodo78@gmail.com

Abstrak - Aksi terorisme yang sempat terjadi beberapa waktu lalu di pusat ibukota memang sangat menggemparkan masyarakat DKI Jakarta. Kominda DKI Jakarta sebagai salah satu wadah koordinasi antar matra intelijen daerah melakukan giat rutin bulanan untuk membahas isu-isu terkait keamanan wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Indonesia. Peran intelijen daerah diperlukan dalam mendukung keamanan wilayah DKI Jakarta dan pertahanan Negara dalam mengumpulkan informasi-informasi dari masyarakat yang memiliki kecenderungan untuk mengacaukan wilayah. Tentu saja untuk pengumpulan informasi yang komprehensif diperlukan pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta agar pengumpulan informasi terkait keamanan wilayah DKI Jakarta berada di jalur intelijen yang tepat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk menganalisis pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta dalam deteksi dini dan cegah dini kasus terorisme di wilayah DKI Jakarta. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kominda DKI Jakarta dalam pelaksanaannya tidak ada hambatan yang berarti karena dalam Kominda DKI Jakarta hambatan berarti tantangan yang harus dihadapi. 2) Kerjasama Kominda DKI Jakarta dengan matra intelijen Kominda DKI Jakarta lainnya berjalan harmonis dan rutin bertukar informasi dan tidak terjadi tumpang tindih. 3) Pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta sebagai salah satu institusi yang dapat membantu mencegah dan mengatasi konflik di wilayah DKI Jakarta sudah berjalan sesuai dengan kaidah yang berlaku walaupun ada egosektoral dari masing-masing lembaga intelijen. Lalu, pengawasan juga sudah dilakukan baik internal maupun eksternal intelijen.

Kata Kunci: Pengawasan, Peran Intelijen, Kominda, Dukungan, Pertahanan Negara

Abstract - The acts of terrorism that had occurred some time ago in the center of the capital city were indeed very shocking to the people of DKI Jakarta. Kominda DKI Jakarta, as one of the coordinating platforms for regional intelligence, has been active monthly to discuss issues related to the security of the DKI Jakarta area as the capital city of Indonesia. The role of regional intelligence is needed in supporting regional security of DKI Jakarta and state defense in gathering information from people who have a tendency to disrupt the territory. Of course, to collect comprehensive information, it is necessary to monitor the role of DKI Jakarta Kominda's intelligence so that the collection of information related to the security of the DKI Jakarta area is on the right intelligence path. Therefore this research was conducted in order to analyze the monitoring of the role of DKI Jakarta Kominda's intelligence in early detection and early prevention of terrorism cases in the DKI Jakarta area. The method used in this research is a qualitative method with a phenomenological approach and data collection techniques for observation, interviews, and documentation. The results of the research show that: 1) Kominda DKI Jakarta in its implementation there are no significant obstacles because in Kominda DKI Jakarta, obstacles mean challenges that must be faced. 2) The cooperation between Kominda DKI Jakarta and other Kominda DKI Jakarta intelligence officers runs harmoniously and regularly exchanges information and does not overlap. 3) Monitoring the role of DKI Jakarta Kominda's intelligence as one of the institutions that can help prevent and resolve conflicts in the DKI Jakarta area has been running according to the prevailing rules, even though there are egosectorals from each intelligence agency. Then, supervision has also been carried out, both internal and external intelligence.

Key words: Supervision, Intelligence Role, Kominda, Support, National Defense

Pendahuluan

Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai "kejahatan luar biasa" atau "extraordinary crime" dan dikategorikan pula sebagai "kejahatan terhadap kemanusiaan" atau "crime against humanity". Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tentulah tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana biasa seperti pencurian, pembunuhan atau penganiayaan. Tindak pidana

terorisme selalu menggunakan ancaman atau tindak kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa tanpa memilih-milih siapa yang akan menjadi korbannya. Akibat dari tragedi WTC 2001 ini memunculkan banyak grup-grup terorisme dan radikalisme yang menyebar ke seluruh dunia hingga masuk ke regional Asia Tenggara, salah satunya yaitu Kelompok Teroris Abu Sayyaf yang bermarkas di Filipina. Kelompok Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group, ASG) adalah kelompok teroris yang beroperasi di wilayah berbentuk segi empat di wilayah Laut Sulu, dan bermarkas di sekitar Filipina Selatan. Daerah operasi kelompok ini membentang dari timur laut garis pantai Pulau

Kalimantan hingga pulau-pulau utama di Kepulauan Filipina, serta dari Pulau Palawan hingga Kepulauan Sulu. Abu Sayyaf mendapatkan aliran dana dari jaringan Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden terkait kepentingan memperluas jaringan di Asia Tenggara. Selain bantuan dana, Osama bin Laden juga memberikan pendampingan organisasi dengan mengirim Wali Khan Amin Shah ke Filipina untuk melakukan rekrutmen dan membantu pelatihan militer. (Chalk, 2002)

Selain Filipina, kelompok jaringan teroris pun menyebar di Indonesia yang menyebabkan keresahan di masyarakat dengan berbagai bentuk teror dan sikap radikal. Berbagai peristiwa teror berupa peledakan bom yang terjadi di Indonesia sejak 2002 saat tragedi Bom Bali Legian yang telah menimbulkan banyak korban nyawa dan harta benda. Seseorang atau kelompok yang melakukan kekerasan dengan pengaruh sumber-sumber radikalisme tidak memandang bahwa aksi kekerasan yang dilakukan sebagai sebuah kejahatan. Aksi kekerasan tersebut menjadi kebanggaan karena merasa sebagai pasukan pertempuran yang sah dalam memperjuangkan apa yang diyakininya. Radikalisme yang ditentukan oleh persepsi individu tentu tidak hanya dipengaruhi suatu landasan ideologi tertentu, namun dapat dipengaruhi oleh beragam faktor lain dalam lingkup isu global, regional, maupun lokal.

Isu-isu yang dapat mempengaruhi radikalisme antara lain, faktor ekonomi, sosial budaya, pendidikan, psikologi, kegagalan tujuan politik, pemahaman agama, maupun kebijakan pemerintah yang berlawanan kepentingan.

Di era reformasi, aksi terorisme meningkat secara signifikan baik secara kuantitas maupun kualitas. Hingga pemerintah terlihat semakin serius dalam penanggulangan aksi terorisme dengan mengeluarkan Perpres No. 46 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang pada tahun 2012 telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012. Pembentukan BNPT tersebut kebijakan negara dalam penyelenggaraan terorisme di Indonesia sebagai pengembangan dari Desk Koordinasi Penanggulangan Terorisme (DKPT) yang dibuat pada tahun 2002. (Aris Sarjito, 2019) Aksi teror bom pun terjadi juga di ibu kota Republik Indonesia, DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian.

Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta merupakan suatu kota yang berada di Pulau Jawa. Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibu Kota Indonesia yang memiliki perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat diberbagai bidang dan sektor. Selain menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat perekonomian terbesar di Indonesia. Sektor industri perdagangan dan jasa yang

menyumbang tertinggi perekonomian di Jakarta. Melihat pertumbuhan Kota Jakarta yang begitu cepat dan pesat, yang dikarena oleh banyak faktor seperti pusat perkantoran, perdagangan, pemerintahan, perdagangan, bisnis dan permukiman menyebabkan banyak masyarakat yang cenderung untuk mencari penghasilan di Jakarta. Sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Republik Indonesia, DKI Jakarta sebagai ibu kota menghadapi dua jenis ancaman, yakni ancaman tradisional yang berupa ancaman militer dari aktor negara yang ingin mengganggu, mengancam, atau merusak kesatuan serta kedaulatan NKRI, serta ancaman non-tradisional, yakni ancaman dari aktor non-negara berupa teror, perampokan, kriminalitas, penyelundupan obat-obatan terlarang dan lainnya yang dapat menimbulkan rasa tidak aman di tengah masyarakat. (Bappenas, 2019) Atas segala ancaman yang terjadi di ibu kota tersebut, maka dibutuhkan penanganan strategis dalam menangkal terjadinya setiap ancaman. Dalam penanganan tersebut, terdapat institusi yang berfungsi untuk mendeteksi secara dini kemungkinan peristiwa yang terjadi yaitu, institusi intelijen. Peran institusi intelijen dalam mengatasi ancaman dengan melakukan deteksi dini dan cegah dini agar tidak terjadi pendadakan strategis yang bisa mengancam kedaulatan Negara. Berbagai kasus

di Jakarta yang membuktikan bahwa diperlukan usaha lebih untuk menjaga Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota dari berbagai ancaman yang faktual.

Organisasi- organisasi intelijen di dalam sistem keamanan nasional suatu Negara seperti Kominda, mengumpulkan dan menganalisa bersama setiap informasi yang sangat penting mengenai potensi ancaman yang mengancam keamanan nasional, untuk memberikan masukan bagi pejabat yang berwenang, agar membentuk suatu kebijakan di bidang keamanan nasional. Pentingnya intelijen di dalam suatu sistem keamanan nasional untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan nasional, sehingga pejabat yang berwenang berdasarkan laporan kajian organisasi intelijen mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan nasional. Intelijen juga berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis yang diambil oleh pejabat yang berwenang, karena dengan fungsi yang dimiliki oleh intelijen tersebut, ia mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendadakan strategis atau *strategic surprises*, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen selain terintegrasi dengan sistem keamanan nasional, intelijen juga dengan sistem strategis nasional suatu Negara. (Bhakti, 2005)

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang diikuti dengan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, kegiatan Koordinasi Intelijen Negara dari tingkat pusat hingga tingkat daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Badan Intelijen Negara (BIN) serta secara struktural diselenggarakan hanya sampai tingkat provinsi yang kemudian disebut dengan Kominda. Dari Perpres ini kemudian diturunkan menjadi Permendagri No. 16 Tahun 2011 tentang Komunitas Intelijen Daerah, lalu diturunkan menjadi Pergub No. 74 Tahun 2012 tentang Komunitas Intelijen Daerah, hingga menjadi PerKaBIN No. 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah. Intinya dari semua Undang-Undang dan peraturan tersebut bahwa, Kominda sebagai forum komunikasi antara unsur Intelijen pada tingkat daerah, dibentuk dari tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh kepala daerah masing-masing untuk menjaga keamanan wilayah melalui informasi unsur intelijen daerah.

Komunitas intelijen daerah diharapkan berfungsi sebagai mata dan telinga untuk meredam konflik atau ledakan di wilayah. Karena, pada dimensi pertama ini, Kominda DKI Jakarta adalah sebuah organisasi atau orang yang terdiri dari berbagai unsur penyelenggara intelijen yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mencari,

mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau informasi dan materi intelijen terkait dengan gejala yang mendasari yang dapat mengancam kestabilan wilayah. Selain itu, Kominda DKI Jakarta juga diharapkan dapat memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan kebijakan Forkopimda dalam kebijakan terkait deteksi dini dan peringatan ancaman demi stabilitas daerah. Selanjutnya, untuk menjamin penyelenggara intelijen Kominda DKI Jakarta tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugas yang akan dilaksanakan oleh *stakeholder* terkait. Adanya stigma yang beredar di masyarakat bahwa kasus terorisme yang terjadi di ibukota merupakan suatu kegagalan intelijen dalam deteksi dini dan cegah dini, maka pengawasan peran intelijen Kominda mutlak diperlukan.

Yanuarti menyebut setidaknya ada lima alasan mengapa pengawasan intelijen penting untuk dilakukan. Pertama, intelijen bekerja hampir selalu secara rahasia dimana hal tersebut bertentangan dengan konsep pengawasan demokratis yang menekankan pada keterbukaan dan transparansi. Kedua, intelijen memiliki kapasitas dan kapabilitas khusus seperti memasuki wilayah pribadi atau komunikasi yang bersinggungan dengan prinsip HAM, sehingga membutuhkan

pengawasan yang ketat. Ketiga, terjadinya penyesuaian intelijen sebagai konsekuensi dari adanya bentuk ancaman keamanan baru sehingga membutuhkan pengawasan yang tepat. Keempat, intelijen memiliki fungsi sebagai pengumpul dan penganalisis informasi mengenai kemungkinan adanya ancaman serta membuat penilaian atas adanya ancaman. Penilaian atas ancaman ini merupakan kewenangan yang menjadi titik awal kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh intelijen negara. Kelima, pengawasan intelijen secara demokratik menjadi suatu keharusan karena institusi intelijen pada masa lalu (rezim otoriter) seringkali digunakan untuk melindungi kekuasaan pemimpin otoriter dan menjadi alat represif. (Yanuarti, 2017)

Dari gambaran atau deskripsi yang telah diurai di atas, mendapatkan suatu gambaran betapa pentingnya peran intelijen Kominda di dalam suatu sistem keamanan di daerah maupun nasional/ Negara untuk mendeteksi dini suatu ancaman terhadap keamanan wilayah maupun nasional/ Negara, sehingga *stakeholder* yang berwenang berdasarkan laporan kajian intelijen Kominda mampu merumuskan suatu kebijakan demi keamanan wilayah maupun nasional/ Negara. Kominda berperan dalam sebuah pengambilan keputusan strategis berdasarkan analisis dan forecasting penyelenggara intelijen

Kominda, sehingga mampu memberikan pencegahan dini terhadap pendudukan strategis atau *strategic surprises*, sehingga sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara mampu terlindungi secara baik. Dalam hal ini dapat diartikan intelijen Kominda selain terintegrasi dengan sistem keamanan di daerah maupun nasional, juga dengan sistem strategis nasional suatu Negara dalam rangka menjaga pertahanan Negara.

Metodologi Penelitian

Metode dan Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif yang menggunakan pendekatan fenomenologi untuk menganalisis dan menggali lebih dalam terkait pengawasan peran intelijen dalam mendukung pertahanan Negara di Jakarta. Dalam mencapai tujuan penelitian, maka metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi berguna untuk memperoleh informasi tentang sesuatu yang belum banyak diketahui karena adanya peluang untuk mendapatkan informasi yang terperinci. Metode kualitatif merupakan cara atau metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang menurut sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap bermula dari masalah sosial atau kemanusiaan. (Creswell, 2010)

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di kantor Kominda DKI Jakarta dan

keanggotaan Kominda DKI Jakarta berlokasi di DKI Jakarta dan sekitarnya. Penelitian dilakukan selama 8 bulan pada bulan Juli 2020 - Februari 2021.

Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian dikatakan sebagai seorang informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. (Moleong, 2015)

Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. (Moleong, 2015) Objek penelitian dikatakan sebagai suatu atribut dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2015) Berdasarkan pemahaman tersebut, objek penelitian dapat didefinisikan sebagai suatu fokus penelitian. Artinya fokus penelitian, maka suatu objek penelitian tersebut merupakan hal kunci dalam sebuah penelitian yang akan dikupas dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori yang sesuai. Pada penelitian ini, objek penelitian akan dikaji melalui dukungan pertahanan Negara di Jakarta. Adapun pengimplementasian tersebut direlevansikan terhadap pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta Obyek Penelitian merupakan sasaran penelitian. Sasaran penelitian tidak tergantung pada judul dan topik

penelitian, melainkan secara jelas tergambar dalam rumusan penelitian. (Bungin, 2007) Dengan demikian obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Hambatan, Kerjasama Intelijen Kominda, dan Dukungan Pertahanan Negara.

Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewer*). (Arikunto, 2006) Pertanyaan wawancara bersifat umum karena memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada narasumber untuk mengungkapkan pikiran dan pendapatnya tanpa pembatasan oleh peneliti. (Raco, 2010)

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut. (Nazir, 2011) Selain itu, observasi dianggap sebagai sebuah teknik pengumpulan data untuk mengamati perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam, dan responden. (Sugiyono, 2015)

Dalam penelitian ini, dalam kegiatan observasi dimulai dengan pengamatan secara menyeluruh dan selanjutnya diarahkan kepada

hal yang lebih terfokus. Observasi yang dilakukan pada pengumpulan data ialah guna melihat secara langsung kenyataan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selama berlangsungnya observasi, peneliti menempatkan diri sebagai pengamat secara langsung dan utuh. Dalam penelitian ini, peneliti meninjau proses koordinasi Kominda DKI Jakarta dalam mendukung Pertahanan Negara.

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi tidak terstruktur, pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.

c. Dokumentasi dan Studi Literatur

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya. (Arikunto, 2006) Dokumentasi digunakan sebagai suatu metode atau cara mengumpulkan data-data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan juga termasuk juga buku, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Studi literatur adalah pelengkap teknik observasi dan wawancara. Peneliti dalam melaksanakan penelitian ini akan menelaah dokumen resmi, jurnal-

jurnal ilmiah, dan buku-buku yang relevan dengan menggali data berupa dokumen maupun konvensi dan joint communiqué. (Arikunto, 2006) Dokumen yang dimaksud dapat berasal dari penelitian-penelitian terdahulu maupun laporan-laporan yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan peran intelijen antar lembaga intelijen.

Pemeriksaan Keabsahan Data

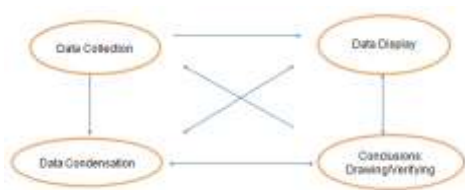
Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. (Moleong, 2015) Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. (Sugiyono, 2015)

Teknik Analisis Data

Data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan pada saat penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan penelitian. Analisis data dilakukan untuk mendeskripsikan seluruh data sehingga dapat di pahami dan membuat kesimpulan. Hasil yang diperoleh melalui analisis data dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan teori yang dibangun dari data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan interaktif model dari Huberman, dan Saldana, yang menerapkan empat langkah dalam menganalisis data seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Berikut langkah-langkah teknik analisis data dalam penelitian kualitatif :



Gambar 1. Langkah teknik analisis data penelitian Kualitatif

Sumber: Miles and Huberman (2014)

Hasil dan Pembahasan

1. Hambatan Peran Intelijen Kominda DKI Jakarta

Tahapan awal dari proses analisis hambatan sebagai bentuk pengawasan peran intelijen Kominda dalam mendukung pertahanan Negara di Jakarta adalah menganalisis indikator dari teori hambatan yang diantaranya adalah pengirim pesan (sender), media (media), dan penerima pesan (receiver). Penelitian ini dilaksanakan di Kominda DKI Jakarta selaku wadah matra intelijen DKI Jakarta yang mewadahi para unsur penyelenggara intelijen DKI Jakarta dalam sharing informasi terkait keamanan wilayah DKI Jakarta.

a. **Sender (Pengirim Pesan)**

Kominda DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi para intelijen daerah yang berperan menaungi dan mewadahi informasi para intelijen daerah terkait keamanan wilayah DKI Jakarta dalam proses pengiriman informasi kepada user Kominda DKI Jakarta atau pimpinan masing-masing kesatuan tidak ada hambatan yang berat karena dalam forum Kominda DKI Jakarta ini menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Kominda DKI Jakarta sebagai sebuah organisasi para intelijen daerah yang berperan menaungi dan mewadahi informasi para intelijen daerah terkait keamanan wilayah DKI Jakarta dalam proses pengiriman informasi kepada user Kominda DKI Jakarta atau pimpinan masing-masing kesatuan tidak ada hambatan yang berat karena dalam forum Kominda DKI Jakarta ini menjadi tantangan yang harus dihadapi.

Hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa matra intelijen Kominda DKI Jakarta mempunyai peran hanya sebatas fungsi intelijen saja lidpamgal, mengumpulkan informasi dari berbagai *stakeholder* terkait pada saat rapat rutin/ khusus yang diadakan Kominda DKI Jakarta sebagai wadah sharing

informasi antar lembaga intelijen daerah.

Tahap awal yaitu perencanaan dimulai dari briefing kepada agen lapangan agar dapat mengumpulkan informasi dengan akurat. Mulai dari pengumpulan identitas terduga jaringan sel teroris, koneksinya, lokasinya, kerabatnya, dll. Dari informasi-informasi yang dikemukakan di forum tersebut akan sangat beragam mengingat kesatuan intelijen Kominda DKI Jakarta terdiri dari berbagai matra intelijen, maka intelijen Kominda DKI Jakarta memadukan informasi-informasi tersebut hingga menjadi informasi yang bulat dan kemudian mengkaji informasi tersebut sebagai bentuk *deni ceni* yang akan diserahkan kepada user yaitu Gubernur DKI Jakarta dan pimpinan masing-masing kesatuan para intelijen tersebut.

Bentuk pengiriman informasi ini kepada user guna mendukung keamanan wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota dan pusat perekonomian Negara Indonesia yang harus dijaga sedemikian rupa agar stabilitas nasional terjaga sehingga pertahanan Negara akan kuat jika ibu kota Negara kuat.

b. Media

Kominda DKI Jakarta sebagai himpunan para anggota intelijen daerah tidak memerlukan media khusus dalam mengumpulkan informasi dalam operasi kegiatan intelijen. Penggunaan media mainstream serta tatap muka masih menjadi media paling efektif dalam proses pengumpulan informasi yang akan disatukan, dikaji, dan diserahkan kepada user masing-masing kesatuan. Para anggota intelijen Kominda DKI Jakarta saling bertukar informasi berupa data, keterangan, pendapat dan lainnya melalui konsultasi, rapat dan diskusi yang rutin diadakan oleh forum Kominda DKI Jakarta.

Media pengumpulan informasi intelijen bersifat rahasia dan tertutup, oleh karena bersifat rahasia maka jika penggunaan media intelijen dibebaskan secara detail akan sangat mudah terdeteksi oleh terduga teroris, karena itu kadangkala minimalisasi media ini menjadi hambatan dalam pengumpulan informasi untuk diserahkan kepada Kominda DKI Jakarta.

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada hasil penelitian, media yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggunaan media yang digunakan selama proses pengumpulan informasi di lapangan oleh agen lapangan

yang telah diberikan arahan oleh kesatuan masing-masing intelijen. Pada forum Kominda DKI Jakarta sendiri dalam rapatnya hanya menggunakan media seperti tatap muka saja karena dirasa lebih efektif dan karena semua yang berkaitan dengan intelijen bersifat rahasia maka, penggunaan media diminimalkan.

c. **Receiver (Penerima Pesan)**

Para intelijen Kominda DKI Jakarta tidak mengalami miskomunikasi walaupun informasi yang diberikan hanya informasi-informasi umum terkait keamanan wilayah yang akan mendukung kelangsungan pertahanan Negara. Dengan adanya organisasi intelijen bernama Kominda (Komunitas Intelijen Daerah) yang tujuannya adalah mempermudah komunikasi antar matra intelijen daerah dalam memberikan informasi terkait wilayah DKI Jakarta, maka apapun hambatan komunikasi yang ada dalam penyampaian informasi pada dinamika forum Kominda DKI Jakarta, ini menjadi tantangan.

Dalam proses penyampaian informasi yang didapat dari agen lapangan yang bertugas, Kominda DKI Jakarta terkait miskomunikasi tidak pernah terjadi miskomunikasi, karena semua informasi dari *stakeholder* penyelenggara intelijen daerah akan disinkronkan di forum Kominda

yang rutin diadakan pertemuan sebulan sekali dan biasanya akan menjadi sering menjelang akhir tahun untuk menjaga keamanan wilayah DKI Jakarta terkait liburan Nataru.

Tatap muka akan lebih tegas di forum Kominda DKI Jakarta karena jika ada hal-hal yang kurang nyaman maka akan disampaikan di forum, sehingga tidak ada miskomunikasi karena saling mensupport dan melengkapi informasi. Miskomunikasi di Kominda DKI Jakarta menjadi minimalis, karena kalau sebuah organisasi selalu miskomunikasi pasti sudah gagal dari awal.

2. **Kerjasama Intelijen Kominda DKI Jakarta**

a. **Pertukaran Informasi**

Proses pertukaran informasi antar matra intelijen Kominda DKI Jakarta sudah berlangsung secara harmonis, karena masing-masing matra intelijen saling bertukar informasi agar menjadi padu untuk kemudian diserahkan kepada user Kominda DKI Jakarta atau pimpinan masing-masing kesatuan. pertukaran informasi yang terjadi di Kominda DKI Jakarta memang berjalan rutin setiap bulan melalui rapat-rapat dan berangkat dengan kepentingan yang sama yaitu setiap matra

intelijen Kominda DKI Jakarta melaporkan dan berbagi informasi terkait keamanan wilayah DKI Jakarta untuk dipadukan menjadi suatu kesatuan informasi yang akan dikaji dan diserahkan kepada user Kominda DKI Jakarta, yaitu Gubernur DKI Jakarta maupun pimpinan masing-masing intelijen.

Terkait isu terorisme, memang informasi secara keseluruhan tidak akan secara detail diberikan karena Kominda DKI Jakarta hanya sebuah wadah untuk menyatukan informasi yang didapat dari agen lapangan yang tidak mempunyai wewenang penindakan. Tingkatan informasi pun diklasifikasikan oleh kesatuan masing-masing intelijen, ada yang bersifat rahasia dan sangat rahasia yang tidak mungkin akan diberikan pada saat rapat rutin, dan jikapun suatu isu tergolong sangat rahasia maka, rapat dinamakan rapat khusus yang hanya dihadiri oleh stakeholder terkait. Penyampaian informasi yang ada di Kominda DKI Jakarta bersifat umum dan dasar saja.

Pada intinya, dalam proses penyampaian informasi walaupun kadangkala egosektoral

lembaga para intelijen Kominda DKI Jakarta dimunculkan dalam rapat rutin, tetapi tidak pernah terjadi tumpang tindih dalam bertugas mengumpulkan informasi karena prosedur masing-masing kesatuan intelijen Kominda DKI Jakarta tersebut tidak sama satu dengan lainnya, sehingga informasi yang dihasilkan walupun beragam dapat disatukan dengan rembuk antar intelijen tersebut di rapat Kominda DKI Jakarta.

b. Koordinasi

Proses koordinasi dalam penyampaian informasi yang terjadi antar aparat intelijen Kominda DKI Jakarta terjalin karena saling mensinkronkan informasi yang didapat dari agen lapangan. Interaksi antar mata intelijen Kominda DKI Jakarta terkait persiapan/perencanaan intelijen Kominda DKI Jakarta dalam menghadapi terorisme yaitu dimulai dari tahap pengumpulan informasi dari agen lapangan, pengawasan terhadap terduga teroris, membuat diskusi kontra radikal, serta melakukan monitoring bersama intelijen Kominda DKI Jakarta lainnya dalam rangka deny ceni di wilayah DKI Jakarta.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan Kominda DKI Jakarta menjadi faktor penting dalam mengumpulkan informasi. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerentanan di kawasan, termasuk terorisme. Fungsi koordinasi Kominda DKI Jakarta adalah menjaga hubungan baik dalam berbagai kegiatan.

Sebagai organisasi antar departemen, fungsi koordinasi sangat penting dan dijalankan oleh Kominda DKI Jakarta, karena pelaksanaan kegiatan Kominda DKI Jakarta melibatkan banyak orang. Kominda DKI Jakarta berkomunikasi dengan badan intelijen di daerah dalam bentuk rapat koordinasi rutin.

Koordinasi dilakukan sebulan sekali, namun bila ada hal khusus bisa dilakukan kapan saja. Format rapat koordinasi Kominda DKI Jakarta adalah membahas isu-isu utama di daerah. Realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

Namun, jika rapat koordinasi bisa berjalan terus menerus selama sebulan, efeknya akan lebih baik. Dalam rapat koordinasi tersebut, masing-masing anggota Kominda DKI

Jakarta memberikan informasi baru yang diperoleh, seperti isu terorisme untuk diserahkan kepada user masing-masing dan segera dilakukan denyalasi.

c. Wadah Informasi

Adanya wadah komunikasi antar intelijen daerah yang bernama Kominda DKI Jakarta ini, maka proses penyampaian informasi dapat terwadahi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kominda DKI Jakarta menyatukan semua informasi yang didapat dari mata intelijen daerah, yang kemudian dikaji bersama-sama dan dimusyawarahkan produk intelijennya.

Kerjasama yang terjalin ini membuat Kominda DKI Jakarta tidak ada tumpang tindih dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga koordinasi menjadi maksimal. Para unsur penyelenggara intelijen daerah memiliki satu wadah resmi dinamakan Kominda DKI Jakarta untuk bertukar dan mengkaji informasi dari agen intelijen terkait. Selain itu, antar mata intelijen Kominda DKI Jakarta juga melakukan koordinasi lintas struktur karena masalah terorisme ini sangat kompleks dan perlu upaya pendalaman yang lebih.

Dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas wilayah DKI Jakarta maupun nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah yang dalam rangka penyelenggaraannya perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional, dan ini dapat diwadahi oleh satu wadah kerjasama yang dinamakan Kominda.

Pembentukan wadah kerjasama yang dinamakan Kominda DKI Jakarta ini juga dalam rangka menyikapi perkembangan situasi wilayah/ nasional yang semakin mengkhawatirkan dan ditandai dengan berbagai aksi teror di berbagai daerah di DKI Jakarta, salah satunya terorisme.

Dengan adanya wadah kerjasama bernama Kominda ini maka Pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata guna mengkoordinasikan unit-unit intelijen dari berbagai lembaga yang ada, sehingga dapat dilakukan deteksi dini, peringatan dini atas Ancaman, Tantangan,

Hambatan, dan Gangguan (ATHG).

3. Pengawasan Peran Intelijen DKI Jakarta

Tahapan selanjutnya dari proses analisis pengawasan sebagai bentuk pengawasan peran intelijen Kominda dalam mendukung pertahanan Negara di Jakarta adalah menganalisis indikator dari teori pengawasan yang diantaranya adalah identifikasi masalah, metode kontrol, evaluasi kinerja, penemuan penyimpangan, penyebab penyimpangan, dan tindakan perbaikan.

a. Identifikasi Masalah

Proses identifikasi permasalahan ini merupakan tahap awal dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan proses identifikasi menggunakan metode-metode tersendiri yang disesuaikan dengan kesatuan masing-masing, diharapkan metode-metode pengumpulan informasi ini dapat membantu mempermudah mengidentifikasi masalah-masalah potensial di wilayah DKI Jakarta, khususnya terorisme.

Matra intelijen Kominda DKI Jakarta mempunyai cara masing-masing agar semua informasi terduga sel teroris dapat terkumpul baik secara

struktural maupun jaringan, secara makro ke mikro, *profiling* terduga sel teroris yang akan menjadi bank data mereka. Tentu saja proses identifikasi ini berlangsung selama 24 jam non stop karena informasi terkait pengidentifikasian masalah-masalah yang berpotensi terorisme ini bisa berasal dari mana saja termasuk dari atasan.

Proses identifikasi masalah potensial ini berarti perencanaan awal dalam mengumpulkan informasi. Sehingga, intelijen Kominda DKI Jakarta perlu meningkatkan kualitas aparat intelijen harus mampu mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan data terkait kelompok terorisme yang ada di wilayah DKI Jakarta.

Proses identifikasi permasalahan ini bisa disebut sebagai suatu *early warning system* yang dilakukan intelijen Kominda DKI Jakarta sebagai bentuk dari ketahanan wilayah DKI Jakarta yang akan mendukung pertahanan Negara.

b. Metode Kontrol

Pemilihan metode kontrol ini merupakan tahap kedua dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan pemilihan metode kontrol yang tepat agar

informasi yang didapat dari agen lapangan tepat sasaran dan sesuai dengan dengan kesatuan masing-masing, diharapkan pemilihan metode kontrol ini dapat membuat kredibilitas informasi yang didapat kredibel karena informasi ini akan disampaikan dalam forum Kominda DKI Jakarta pada rapat rutin koordinasi.

Metode kontrol yang dilakukan masing-masing aparat intelijen beragam, karena tergantung kondisi saat melakukan pengumpulan informasi tersebut. Karena terorisme paling dekat masuk lewat sisi agama, maka dari itu pengumpulan informasi pun dikontrol dengan menggandeng tokoh agama yang kharismatik untuk meminimalisir ekstrimisme dan radikalisme.

Adapun didukung dengan agen lapangan yang sudah di briefing untuk membaur dengan jaringan sel teroris yang ditempatkan di komunitas tersebut dan mendata apa aktivitas mereka sehari-hari apakah ada kemungkinan potensi untuk melakukan tindakan terorisme. Semua ini dilakukan secara rahasia dan tertutup dalam menanamkan planted agent karena sangat berbahaya sekali jika *covert action* ini sampai terbuka.

Sekaligus metode kontrol yang dipilih masing-masing

yang dilakukan kesatuan tersebut juga tidak akan sampai menyalahi dasar hukum intelijen, yaitu Undang-Undang Intelijen No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen.

c. Evaluasi Kinerja Perencanaan

Proses evaluasi kinerja perencanaan ini merupakan tahap ketiga dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan proses evaluasi kinerja perencanaan yang tepat agar dapat mengaktualisasi metode-metode kerja yang digunakan oleh agen lapangan agar sesuai dengan kesatuan masing-masing, diharapkan proses evaluasi kinerja perencanaan ini dapat mengaktualisasi metode-metode dalam proses pengumpulan informasi agar arus informasi yang didapat kredibel karena informasi ini akan disampaikan dalam forum Kominda DKI Jakarta pada rapat rutin koordinasi.

Evaluasi perencanaan juga dilakukan dengan waktu yang beragam di setiap kesatuan intelijen Kominda DKI Jakarta, ada yang berkala dan ada juga yang situasional, dan dilakukan oleh masing-masing pimpinan intelijen kesatuan mereka. Biasanya dalam evaluasi perencanaan ini akan ada penambahan-penambahan khusus yang harus dilakukan oleh agen lapangan dalam

pengumpulan informasi agar informasi yang diperoleh oleh agen lapangan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, dalam evaluasi perencanaan ini seringkali mengganti perencanaan lama dengan perencanaan baru karena saat di lapangan, agen intelijen tidak dapat mengumpulkan informasi secara maksimal dalam prosesnya, karena hambatan-hambatan dan dinamika isu yang terjadi saat *real-time* yang tidak ada dalam perencanaan lama. Ini akan menjadi suatu penambahan khusus dalam pengumpulan informasi.

d. Penemuan Penyimpangan

Proses penemuan penyimpangan ini merupakan tahap keempat dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan proses penemuan penyimpangan agar dapat memperingati agen lapangan guna tidak keluar jalur dari proses pengumpulan informasi yang sudah ditentukan oleh kesatuan agar sesuai dengan kesatuan masing-masing, diharapkan proses penemuan penyimpangan ini dapat menjadi evaluasi selanjutnya dalam proses pengumpulan informasi agar informasi yang didapat maksimal tidak ada penyimpangan, karena

informasi ini akan disampaikan dalam forum Kominda DKI Jakarta pada rapat rutin koordinasi.

Dalam menemukan penyimpangan yang terjadi di unsur intelijen lapangan yang melakukan pengumpulan informasi ini dilakukan penyelidikan sesuai dengan fungsi intelijen. Karena *mostly*, unsur intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan pencegahan atau tindakan preventif sebelum terjadinya penyimpangan yang telah diramalkan, maka dari dari rapat-rapat forum Kominda DKI Jakarta akan dibahas secara umum seperti apa jenis-jenis penyimpangan yang ditemukan saat pengumpulan informasi tentang terorisme, kemudian secara komprehensif akan dibahas di kesatuan masing-masing terkait penemuan penyimpangan yang dilakukan oleh agen intelijen masing-masing kesatuan yang tertangkap melakukan penyimpangan dalam pengumpulan informasi.

e. Penyebab Penyimpangan

Proses memastikan penyebab penyimpangan ini merupakan tahap kelima dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan proses memastikan penyebab penyimpangan agar dapat mengetahui secara pasti penyimpangan yang dilakukan

oleh agen lapangan guna proses pengumpulan informasi tidak terhambat karena penyimpangan tersebut dan sesuai dengan dengan kesatuan masing-masing, dan para intelijen Kominda DKI Jakarta tidak menemukan atau bahkan minim penyimpangan dalam proses pengumpulan informasi, sehingga informasi yang dihasilkan pun mencukupi dalam forum Kominda DKI Jakarta.

Penyimpangan dalam pengumpulan informasi tidak ada baik itu isu sosial maupun terorisme, karena masing-masing unsur intelijen ataupun agen intelijen yang bertugas di lapangan terikat dengan sumpah intelijen yang otomatis sudah memahami apa itu makna dari sumpah intelijen. Selain itu, intelijen Kominda DKI Jakarta lebih mengutamakan tindakan preventif akan terjadinya penyimpangan dengan melakukan koordinasi ataupun rapat-rapat yang digelar rutin tersebut.

Jikapun ditemukan penyimpangan dan sudah dipastikan penyebab penyimpangan yang terjadi di lapangan, maka akan dilakukan penarikan agen lapangan ataupun dilakukan pengawasan dobel, biasanya penyimpangan yang dilakukan adalah terbukanya *covert action*, namun ini akan segera

ditangani secara khusus. karena proses perekrutan agen lapangan ini sangat lama dan bisa berasal dari anggota TNI sendiri ataupun jaringan sel teroris yang sudah bergabung dengan NKRI sehingga loyalitas pun tidak diragukan lagi.

f. Tindakan Perbaikan

Proses tindakan perbaikan ini merupakan tahap keenam dari proses pengawasan. Para intelijen Kominda DKI Jakarta melakukan melakukan tindakan perbaikan agar agen lapangan dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan guna proses pengumpulan informasi yang sesuai dengan dengan kesatuan masing-masing, dan para intelijen Kominda DKI Jakarta mendapatkan supervisi dari pimpinan masing-masing kesatuan agar menghasilkan informasi yang akurat yang akan dibahas dalam forum Kominda DKI Jakarta.

Langkah perbaikan yang dilakukan oleh intelijen Kominda DKI Jakarta dilakukan melakukan evaluasi berkala (mingguan, bulanan, serta tahunan) ataupun tergantung situasi yang membutuhkan dilakukan evaluasi sesegera mungkin. Terutama agen intelijen lapangan yang bertugas membaaur dengan sel teroris, jika *covert action*nya terbuka, maka akan dilakukan penarikan dari lapangan karena akan membahayakan dirinya

dan juga pemutusan hubungan. Maka dari itu, jika *covert action* terbuka, dari kesatuan intelijen masing-masing akan melakukan perbaikan terhadap identitas agen intelijen lapangan dan briefing serta pemberian materi-materi terkait intelijen dan terorisme serta kontra terorisme agar penyamaran ini tidak sampai terbongkar.

Selain itu, intelijen Kominda DKI Jakarta perbaikan juga didapat secara khusus ada supervisi dari *Headquarter*, karena Kominda DKI Jakarta tidak berhadapan langsung secara fisik dengan jaringan sel teroris hanya sebatas profiling dan pengumpulan informasi yang kemudian akan dikirim kepada user. Pengawasan yang dilakukan pun dilakukan oleh masing-masing kesatuan begitu juga dengan tindakan perbaikan yang dilakukan, Kominda DKI Jakarta hanya sebatas umum saja.

Kesimpulan Rekomendasi dan Batasan

Intelijen Kominda DKI Jakarta tidak memiliki hambatan yang berarti, karena bagi Kominda DKI Jakarta hambatan dalam penyampaian informasi-informasi para matra intelijen Kominda DKI Jakarta merupakan sebuah tantangan untuk diselesaikan bersama agar menghasilkan informasi yang bulat. Secara organisasi pun tidak memiliki hambatan

yang menghalangi kinerja para intelijen Kominda DKI Jakarta dalam mengumpulkan informasi, walaupun intelijen Kominda DKI Jakarta tidak memiliki pasukan khusus dalam terorisme karena memang hanya sebatas mengumpulkan informasi untuk user.

Dalam kerjasama peran intelijen Kominda DKI Jakarta, secara garis besar terkait persiapan/ perencanaan intelijen Kominda DKI Jakarta dalam menghadapi terorisme yaitu dimulai dari tahap pengumpulan informasi dari agen lapangan, pengawasan terhadap terduga teroris, membuat diskusi kontra radikal, serta melakukan monitoring bersama intelijen Kominda DKI Jakarta lainnya dalam rangka deny ceni di wilayah DKI Jakarta.

Kebijakan matra intelijen Kominda DKI Jakarta mengikuti kesatuan masing-masing ataupun dari lembaga yang mempunyai wewenang dalam menindak terorisme karena, intelijen Kominda DKI Jakarta hanya sebatas pengumpulan informasi dan mengamati.

Dalam pengawasan peran intelijen Kominda DKI Jakarta secara garis besar, pengawasan dilaksanakan secara internal dan eksternal, internal dilakukan oleh pimpinan masing-masing dan pengawasan juga dilakukan secara eksternal oleh tim

pengawas yang ditetapkan ataupun DPR dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan suatu unit organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan, dan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Sedangkan pengawasan intelijen dilaksanakan dalam kerangka untuk menjamin intelijen tidak melakukan penyimpangan dan pelanggaran HAM sekaligus memberikan nilai tambah dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan intelijen dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sarjito Aris, S. S. (2019). Strengthening Public Participation in Deradicalization in Indonesia. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 252.

- Bappenas. (2019, 6 26). Retrieved 9 28, 2020, from https://www.bappenas.go.id/files/diskusi-ikn-2/Analisis%20Hal%20Keamanan%20Pemindahan%20Ibu%20Kota_kastaf-v3.pdf
- Bhakti, I. N. (2005). *Intelijen dan Keamanan Negara: Reformasi Intelijen Negara*. Jakarta: Pacivis UI & FES.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Putra Grafika.
- Chalk, P. (2002). *Al Qaeda and Its Links to Terrorist Groups in Asia*. Singapore: Eastern University Press.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed. Edisi Ketiga (Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. (2011). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yanuarti, S. (2017). *Dinamika Pengawasan Intelijen di Indonesia*. Jakarta : LIPI Press.